



LEMBAGA ANEUK MUDA PEDULI UMAT

Jl. Mata le Lr. Permai X No. 74 Perumahan Bukit Permai, Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh HP. 0811 6855 377 Kode Pos 23352

Number : 03/LoA-Sinthop/v4.i2/VIII/2025
Subject : *Letter of Acceptance*

To:

Intan Dewi Syafitri, Musdawati, Suci Fajarni

Thank you for submitting your manuscript to *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, titled:

“PEREMPUAN DALAM JERATAN KEMISKINAN: ANALISIS FAKTOR AKSES SDM, BUDAYA PARIARKI, DAN DOMESTIFIKASI DI KOTA BANDA ACEH”

Based on the results of the peer review process, we are pleased to inform you that your article has been **ACCEPTED** for publication in *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, Volume 4, Number 2, July-December 2025.

We are also pleased to inform you that *SINTHOP Journal* is indexed in *DOAJ (Directory of Open Access Journals)* and accredited at *SINTA 4* based on the Decree of the Director General of Research and Development Number 10/C/C3/DT.05.00/2025, dated March 21, 2025, issued by the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology of the Republic of Indonesia. This accreditation is valid from Volume 1 Issue 1 (2022) to Volume 5 Issue 2 (2026).

We hope this letter serves your needs accordingly.

Aceh Besar, August 25, 2025
Editor in Chief



Dr. Muhammad, S.Th.I., MA.

Perempuan dalam Jeratan Kemiskinan: Analisis Faktor Akses SDM, Budaya Patriarki, dan Domestifikasi di Kota Banda Aceh

Intan Dewi Syafitri, Musdawati, Suci Fajarni

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Ar-Raniry Banda Aceh

200305015@student.ar-raniry.ac.id, musda.wati@ar-raniry.ac.id, suci.fajarni@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang terjadi di belahan dunia manapun dan terus mendapatkan perhatian publik sejak dulu hingga sekarang. Seringkali perempuan diabaikan dalam hal kemiskinan. Padahal banyak hal yang dihadapi oleh perempuan ketika terperangkap dalam hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan yang terjadi pada perempuan di Kota Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, untuk menemukan makna dan menggali lebih dalam terkait fakta mengenai kemiskinan yang terjadi pada perempuan secara terus menerus. Data diperoleh dari hasil wawancara dengan menggunakan *snowball sampling*. Selain itu, data juga diperoleh dari studi literatur dari peneliti terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa banyak yang menjadi faktor kemiskinan pada perempuan. Kemiskinan tersebut bukan hanya dari faktor ekonomi, namun faktor budaya dan sosial yang berperan sangat besar pula. Keterbatasan perempuan dalam mengakses SDM, budaya patriarki, dan keterbatasan perempuan dalam mengakses sumber daya ekonomi menjadi faktor yang sangat sering dijumpai di kalangan masyarakat.

AR - RANIRY

Kata kunci: Kemiskinan, Perempuan, Akses SDM, Budaya Patriarki, Faktor Sosial

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Perempuan dalam Jeratan Kemiskinan: Analisis Faktor SDM, Budaya Patriarki, dan Domestifikasi di Kota Banda Aceh”**. Artikel ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menuntaskan pendidikan penulis dalam rangka meraih gelar strata satu (S-1) di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah memperoleh beragam dukungan dari banyak pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Jojo Sudarjo dan Ibu Nur Jannah. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang tak pernah berhenti diberikan. Meskipun Ayah dan Mama tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, menguahkan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya.
2. Bapak Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag., yang merupakan dekan fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
3. Ibu Musdawati, M. A., selaku pembimbing I sekaligus ketua prodi sisogologi agama, yang telah memberikan banyak bantuan, nasihat, wawasan dan ide-ide yang bermanfaat bagi penulis serta menghadirkan motivasi yang luar biasa untuk menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Nofal Liata, M.Si., yang menjabat sebagai sekretaris program studi Sosiologi Agama.
5. Ibu Suci Fajarni, M. A., yang berperan sebagai pembimbing II, yang telah menyuplai ilmu, arahan dan bimbingan yang sangat berharga selama penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah dengan dermawan berbagi pengetahuan kepada penulis sepanjang masa kuliah.
7. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada seluruh teman-teman seperjuangan saat berkuliah di Sosiologi Agama. Terkhusus kepada Al-Mahira, S.Sos., Silvia Raudha, S.Sos., dan Putri Anggi Ningsih dan teman-teman lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
8. Terimakasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada dua orang teman terbaik saya, Fathina Zahra, S.Pd. dan Muhammad Fudhil, S.H. yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.
9. Kemudian penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh responden pada proses penelitian ini.
10. Terakhir, kepada diri saya sendiri, Intan Dewi Syafitri. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau seringkali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Intan. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

Dalam proses pembuatan karya ilmiah ini, penulis menyadari adanya keterbatasan dalam pemahaman yang membuat skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat menghargai masukan dan saran yang bersifat membangun. Semoga semua kebaikan yang disampaikan oleh setiap

individu mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Dan semoga karya tulis ini bisa memberikan manfaat baik untuk penulis maupun bagi para pembaca.

Banda Aceh, 25 Juni 2025

Penulis,



Intan Dewi Syafitri

NIM. 200305015



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
A. PENDAHULUAN.....	1
B. METODE PENELITIAN	3
C. HASIL DAN PEMBAHASAN	4
1. Perempuan dan Angka Kemiskinan di Kota Banda Aceh	4
2. Kurangnya Akses Perempuan Terhadap SDM	5
a. Kurangnya Akses Pendidikan sebagai Akar Kemiskinan Antargenerasi	5
b. Akses Terbatas ke Sumber Daya Ekonomi.....	7
c. Peran Ganda dan Diskriminasi Upah di Sektor Informal	9
3. Budaya Patriarki	11
4. Domestifikasi pada Perempuan	13
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	16
DAFTAR RIWAYAT HIDUP R - R A N I R Y	19

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah sosial yang persisten, terutama di negara-negara berkembang, yang terus menjadi isu penting di tingkat global. Definisi kemiskinan bervariasi di antara berbagai lembaga dan para ahli. BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi yang dihitung berdasarkan garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan non makanan (GKNM). Garis kemiskinan tersebut diukur berdasarkan pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan yang dihitung dengan mengonsumsi energi minimal 2.100 kilokalori per kapita per hari, serta kebutuhan non-makanan seperti kebutuhan sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok setiap individu lainnya (BPS Provinsi Aceh, 2024). Sedangkan menurut *World Bank* dalam (Reza Attaburrobbi Annur, 2013) mendefinisikan kemiskinan seseorang berdasarkan pendapatan per kapita. *World Bank* juga menjelaskan salah satu faktor kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan makanan, rumah, pakaian serta kesehatan dan pendidikan yang mereka dapatkan (Reza Attaburrobbi Annur, 2013).

Menurut data Badan Pusat Statistik Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2024 tercatat sebanyak 806,75 ribu orang (14,45 persen). Kota Banda Aceh tercatat pada tahun 2024 memiliki penduduk miskin sebanyak 19,97 ribu jiwa (BPS Provinsi Aceh, 2024). Tidak ada data statistik secara terperinci yang menjelaskan kemiskinan perempuan di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan penghitungan angka kemiskinan biasanya berdasarkan kemiskinan yang terjadi di dalam suatu keluarga yang dipimpin oleh perempuan ataupun laki-laki. Namun, perempuan sebagai kelompok yang rentan seringkali terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan karena mereka memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Hal tersebut juga diperparah dengan norma-norma sosial dan budaya yang membatasi peran perempuan di dalam masyarakat. Dapat diartikan bahwa perempuan miskin tidak hanya mendapatkan tantangan secara ekonomi, namun juga mendapat tantangan secara sosial yang meletakkan perempuan selalu berada di dalam lingkaran kemiskinan (Apriliandra dkk., 2022).

Selain dari faktor diatas, dinamika keluarga seperti angka perceraian juga memainkan peran signifikan dalam bertambahnya angka kemiskinan. Tahun 2024 tercatat sebanyak 15.111 jiwa perempuan sebagai kepala keluarga di Kota

Banda Aceh (Open Data Aceh, Oktober2024) . Studi-studi menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya perceraian . Faktor ekonomi tersebut berawal dari berbagai hal, seperti suami yang tidak mendapatkan pekerjaan yang tetap, suami yang berjudi, atau yang bermalas-malasan sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak stabil sehingga menciptakan konflik-konflik baru didalam keluarga yang dapat memicu angka perceraian semakin tinggi (Abubakar, 2023).

Akibat dari banyaknya terjadi perceraian, maka akan muncul lebih banyak perempuan sebagai kepala keluarga. Meskipun angka perempuan kepala keluarga semakin meningkat, dalam bingkai pembangunan, perempuan seringkali kedudukannya tidak terlihat. Kebijakan-kebijakan yang terjadi selama ini seringkali hanya menargetkan laki-laki sebagai kepala keluarga, dengan asumsi laki-laki adalah kepala keluarga yang mengambil keputusan dan berhak atas segala akses di dalam rumah tangga. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan lebih fokus pada peningkatan sumber daya bagi laki-laki, sementara perempuan seringkali diabaikan dalam perencanaan dan implementasi kebijakan (Musdawati, 2024). Kemiskinan ini bukan hanya berdampak secara individu, tetapi juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga dan masyarakat. Misalnya, anak dari keluarga miskin cenderung memiliki akses terbatas di bidang pendidikan maupun kesehatan, sehingga berpotensi siklus kemiskinan antargenerasi akan terus menerus berputar (Apriliandra dkk., 2022).

Kemiskinan yang dialami oleh perempuan telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian, karena banyak penelitian yang menunjukkan kemiskinan pada perempuan lebih banyak terjadi daripada laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakadilan gender di berbagai aspek. Penelitian sebelumnya dengan konsisten menyebutkan faktor kemiskinan yang perempuan alami tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi saja, akan tetapi juga karena faktor budaya yang bersifat diskriminatif. Penelitian yang dilakukan oleh Fawziah Zahrawati B menjelaskan bahwa faktor utama dari kemiskinan adalah kemiskinan kultural dan struktural. Masih banyak nilai-nilai yang diberlakukan oleh masyarakat terhadap perempuan seperti pernikahan dini, keharusan memiliki anak, kehamilan yang terus menerus hingga memperoleh anak laki-laki, dan banyaknya tanggung jawab pekerjaan rumah bagi perempuan sehingga membatasi akses perempuan terhadap fasilitas-fasilitas sumber daya yang ada (Fawziah, 2020). Dalam penelitian Nikodemus Niko yang menjelaskan kemiskinan perempuan Dayak Benawan menunjukkan posisi laki-laki menjadi tonggak kehidupan di ranah publik maupun domestik tanpa memandang pendidikan, jabatan, dan lainnya.

Sudah sejak jaman dahulu posisi laki-laki sebagai pemimpin dalam segala hal bagi perempuan. Hal tersebut yang menjadikan perempuan ‘lemah’ dalam lembaga adat, struktur pemerintahan desa, dan keluarga (Niko, 2019). Upaya penanggulangan kemiskinan harusnya juga memperhitungkan aspek gender agar upaya tersebut lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan dan memberdayakan perempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dengan mengisi celah literatur yang ada, yaitu dengan mengkaji faktor kemiskinan berdasarkan kurangnya akses terhadap SDM, budaya patriarki, dan domestifikasi. Pemetaan data yang lebih terperinci di wilayah Banda Aceh penting untuk mempermudah pembuatan kebijakan dalam melihat dan memberantas permasalahan kemiskinan berbasis gender. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan terkhusus di kalangan perempuan di wilayah Banda Aceh. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan yang dihadapi oleh perempuan miskin. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam mendukung perempuan di Aceh.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif untuk menggali makna dan realitas yang kompleks sesuai dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan faktor-faktor fenomena kemiskinan yang terjadi pada perempuan, yang datanya berupa kata-kata (ucapan), perilaku, atau dokumen yang penyajiannya berbentuk narasi (Rulam Ahmadi, 2014). Wawancara mendalam dan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti melakukan wawancara dengan tujuh orang informan di Kota Banda Aceh menggunakan teknik *snowball sampling* dengan cara mendapatkan informasi bergulir dari responden satu ke responden lain (Ika Lenaini, 2021). Kriteria dalam pemilihan informan adalah perempuan asal Banda Aceh yang berusia di atas 30 tahun dalam kategori miskin yang dilihat dari pendidikannya, kondisi ekonomi (penghasilan dan pengeluaran serta jumlah keluarga yang ditanggungnya), dan perempuan yang bekerja di sektor informal. Peneliti juga melakukan kajian literatur mengenai temuan penelitian terkait isu kemiskinan terkhusus yang

berfokus pada perempuan, berupa jurnal nasional, jurnal internasional, buku, website, dan literatur lainnya. Analisis data penelitian kualitatif umumnya menggunakan teknik yang dicetuskan oleh Miles dan Huberman (Sugiono, 2018:337) dalam (Abdul Fatah, 2023) yang dikenal dengan metode analisis data interaktif. Ada tiga langkah dalam teknik analisis ini, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Teknik untuk menganalisis data dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data, yang kemudian dilanjutkan dengan reduksi data. Setelah melakukan reduksi data, peneliti mempresentasikan data yang telah disusun. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antar konsep. Namun, kesimpulan yang diambil akan terus mengalami perubahan seiring dengan adanya penemuan data-data baru dan analisis yang mendalam (Abdul Fatah Nasution, 2023).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perempuan dan Angka Kemiskinan di Kota Banda Aceh

Informasi mengenai taraf kesejahteraan yang terjadi saat ini, terutama yang diterbitkan oleh BPS menggunakan unsur kajian rumah tangga (Muhammad Sauqi dkk., 2022). BPS Aceh menghitung angka kesejahteraan berdasarkan kepala keluarga. Uraian yang disampaikan oleh BPS menunjukkan bahwa poin yang didapat dari kemiskinan (persentase rumah tangga yang hidup dibawah garis kemiskinan) pada kepala keluarga yang dipimpin oleh perempuan lebih tinggi angkanya jika disandingkan dengan laki-laki sebagai kepala keluarga (Muhammad Sauqi dkk., 2022). Data kemiskinan pada perempuan kepala keluarga yang sebelumnya telah dibahas merupakan bagian penting dalam munculnya angka kemiskinan baru. Perempuan biasanya lebih rentan mengalami kemiskinan dikarenakan banyak faktor yang melatarbelakanginya. Faktor budaya, struktur dan sosial menjadi hal utama dalam melahirkan angka kemiskinan baru pada perempuan.

Kemiskinan perempuan biasanya diawali dari keterbatasan hak mereka di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Keterbatasan akses, keterbatasan modal, dan tidak diberikan hak dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi faktor meningkatnya angka kemiskinan. Selain itu

perempuan yang bekerja juga menjalankan peran ganda yang tentu memiliki banyak hambatan. Perempuan yang bekerja juga terkadang mendapatkan diskriminasi dari lingkungan masyarakat dalam hal pendapatan yang tidak sama dengan laki-laki ataupun argument lingkungan yang tidak mendukung perempuan bekerja. Beberapa penelitian sepakat bahwa akses pendidikan bagi perempuan menjadi kunci penting dalam memutuskan rantai kemiskinan. Pendidikan yang rendah tidak hanya menciptakan kemiskinan antar generasi, tetapi juga berdampak kepada kualitas hidupnya maupun keluarganya secara keseluruhan.

Angka kemiskinan dan perempuan memiliki kaitan yang sangat erat. Maka dari itu penurunan angka kemiskinan yang terjadi di setiap wilayah harusnya melibatkan perempuan dengan cara pemberdayaan terutama pada hak setiap warga negara dan peningkatan akses terhadap layanan dasar serta kebijakan yang lebih responsif gender (Patimah Zahra & Hardius Usman, 2024).

2. Kurangnya Akses Perempuan Terhadap SDM

a. Kurangnya Akses Pendidikan sebagai Akar Kemiskinan Antargenerasi

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam Pasal 31 ayat (1) mengatakan “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. begitupun dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU No.20 Tahun 2003) pasal 5 ayat (1) berbunyi “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*, 2004). Permasalahan pendidikan telah diatur dalam dasar hukum di Indonesia. Hak pendidikan di Indonesia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, sosial budaya, ataupun kondisi ekonomi seseorang. Dengan adanya pendidikan bagi setiap individu diharapkan untuk pengembangan potensi, bakat, dan kemampuan dirinya. Jika seseorang tidak berpendidikan, bisa diartikan bahwa seseorang tersebut tidak dapat mengembangkan potensi yang mereka punya. Potensi tersebutlah yang menjadi awal untuk pemenuhan ekonomi individu. Dalam hal tersebut, dapat diartikan seberapa pentingnya pendidikan dalam pemenuhan ekonomi seseorang dan pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan.

Bukan hanya dalam kemiskinan, pendidikan perempuan sangatlah penting dalam kehidupan keluarga. Seperti yang kita ketahui bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Salah satu tugasnya dirumah adalah mencerdaskan anak-anak bangsa. Lalu bagaimana jika peranan tersebut memiliki keterbatasan pendidikan dan kurangnya pengetahuan untuk dirinya sendiri apalagi untuk anak-anaknya. Keterbatasan pendidikan tersebut menghambat pengembangan diri, kurang mampu mengelola finansial, dan kurangnya mereka dalam mengikuti perkembangan yang ada (Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah & Almas Baisuri, 2022). Peranan perempuan dalam turunnya angka kemiskinan tentu sangat diperlukan. Pemberdayaan perempuan pada aspek ekonomi mampu menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, peran pendidikan juga sangat berpengaruh guna mendapatkan pendapatan yang lebih layak sehingga dapat membantu pendapatan untuk keluarga. Keluarga yang berpenghasilan tinggi mempunyai peluang besar untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk keluarganya, begitupun sebaliknya (Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah & Almas Baisuri, 2022).

Stigma masyarakat mengenai peranan pendidikan perempuan masih sangatlah beragam tentang pemahamannya. Namun berdasarkan data lapangan, alasan kurangnya pendidikan pada perempuan berawal dari kemiskinan warisan yang mereka dapatkan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu NM (52):

“Kakak anak pertama dari 6 kakak beradik. Dulu orang tua kakak orang gaada. Kami semuanya cuma tamatan SMP. Dulu kan sekolah bayar dek jadi lumayan susah kalau kami ngelanjut sekolah. Makan aja susah, gimana mau sekolah.” جامعة الزاوي

Jawaban dari informan tersebut tidak jauh berbeda dengan jawaban dari informan lainnya. Persoalan pendidikan bukan hanya dialami oleh satu orang. Rata-rata permasalahan pendidikan menjadi pemicu utama dalam faktor penyumbang tingkat kemiskinan (Rizal & Yantieka, 2022). Begitupun yang disampaikan oleh ibu ER (44):

“Sebenarnya dulu kakak disuruh lanjutin sekolah sama mamak, tapi karena abang dan adeknya kakak cowok semua. Kakak lebih milih mundur untuk gak usah dilanjutin sekolah. Karna kakak juga fikir nanti yang cowok cari rezeki buat anak istrinya. Kalau mereka gak melanjutkan sekolah, gimana mereka kedepannya. Keluarga kakak

orang miskin dek, ayah cuma tukang becak. Kalau semua di antara kami sekolah, mau makan apa kami. Yaudah kakak sebagai perempuan aja yang mundur”.

Kisah ibu NM dan ibu ER secara jelas menggambarkan bagaimana kemiskinan antargenerasi dan nilai-nilai budaya mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan. Hasil wawancara juga menunjukkan bagaimana pendidikan sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi. Begitupun sebaliknya, ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan. Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikan karena masalah ekonomi yang telah melekat pada individu sejak kecil. Sehingga hal tersebut akan terus menerus berputar apabila tidak adanya kekuatan atau dukungan untuk bangkit dan keluar dari lingkaran tersebut. Namun, berangsur-angsur masalah pendidikan dapat diatasi oleh berbagai pihak. Program beasiswa dan bantuan mengenai pendidikan terus berjalan guna pengentasan kemiskinan. Seperti meningkatnya angka pendidikan yang dicatat oleh BPS Aceh belakangan tahun terakhir (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2025). Diharapkan dengan adanya program-program yang terus berjalan dapat membantu masalah keterbatasan pendidikan dan memutus kemiskinan antargenerasi.

b. Akses Terbatas ke Sumber Daya Ekonomi

Di banyak negara berkembang, salah satunya Indonesia, perempuan seringkali mendapatkan hambatan sistemik dalam mengakses pinjaman usaha, sehingga memperburuk ketidaksetaraan gender dan mempertahankan siklus kemiskinan. Beberapa studi menjelaskan bahwa keterbatasan akses terhadap modal tidak hanya membatasi pertumbuhan bisnis perempuan, tetapi juga membatasi ketergantungan ekonomi pada pria, dan menyampingkan perempuan dari sektor produktif.

Ada beberapa faktor penyebab terhambatnya akses modal bagi perempuan. Berawal dari hambatan sosial, budaya, dan kultural. Budaya patriarki menciptakan norma-norma sosial yang membatasi perempuan dari kepemilikan modal dan akses ke lembaga keuangan. Hal ini biasa diyakini karena kurangnya kepercayaan terhadap perempuan dalam mengelola aset, ataupun kepercayaan budaya yang meyakini aset dan modal hanyalah milik laki-laki. Salah satu contoh hambatan budaya dan struktural bagi perempuan terjadi di Komunitas Dayak Benawan di Kalimantan Barat. Tradisi adat yang meletakkan perempuan

pada posisi subordinat dimana perempuan tidak memiliki hak atas warisan dan manajemen terhadap sumber daya alam telah terjalin sejak lama. Keterbatasan akses pengambilan keputusan terhadap perempuan berimbas kepada adanya struktur pembagian kerja gender yang tidak adil sehingga tradisi adat tersebut menjadi salah satu dari faktor kemiskinan perempuan Dayak Benawan (Niko, 2019).

Contoh lain juga terjadi di salah satu UMKM yang ada di Padang. Walaupun terciptanya UMKM sebagai lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, seringkali UMKM yang dijalankan oleh perempuan mengalami hambatan yang signifikan mengenai keterbatasan dalam mengakses pembiayaan untuk mengembangkan bisnis yang mereka jalani. Faktor-faktor seperti kurangnya jaminan, rendahnya tingkat literasi keuangan, norma budaya dan peran ganda yang dijalankan perempuan mempengaruhi UMKM perempuan dalam mengakses pembiayaan yang dibutuhkan. Sehingga UMKM yang mereka jalankan terperangkap dalam model bisnis informal yang tidak mendukung pertumbuhan dalam jangka panjang (Nofriadi dkk., 2024).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Musdawati menjelaskan tentang keterbatasan perempuan dalam pendidikan, pekerjaan formal, sumber daya ekonomi, termasuk didalamnya modal usaha. Sehingga, para perempuan di Aceh sulit dalam mengembangkan usaha yang tentu saja juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka (Murdawati, 2024). Masalah keterbatasan akses ke sumber daya ekonomi terbukti telah menjadi bagian dari faktor kemiskinan. Bukan hanya di wilayah Aceh saja, tetapi fenomena ini tersebar luas yang berakar pada budaya dan sistem. Faktor selanjutnya yaitu pemahaman perempuan yang rendah mengenai prosedur perbankan dan manajemen keuangan menjadi hambatan utama dalam memiliki akses modal. Perempuan di pedesaan seringkali tidak memiliki dokumen administrasi seperti surat kepemilikan property yang mewakili persyaratan utama dalam mengajukan kredit (Nofriadi dkk., 2024). Selain itu, hanya sedikit perempuan yang mengerti mengenai keuangan berbasis digital, sehingga mereka rentan terhadap pinjaman ilegal berbasis bunga tinggi. Ibu NM (52) yang merupakan responden dalam penelitian ini yang bekerja menjual kue basah juga memiliki pengalaman mengenai keterbatasan akses, ibu NM (52) menjelaskan bahwa:

“Kakak pernah disuruh ngajuin proposal biar nanti dikasi peralatan masak kaya kompor, oven, lain-lainnya lah. Tapi kakak gak tau gimana

cara buat laporannya. Jangankan buat laporan, pegang laptop aja kakak gak pernah. Terus juga harus ada jaminan untuk usaha kakak. Kalau usahanya gak jalan, nanti alat yang udah di kasih diambil balik sama mereka. Sedangkan kadang penjualan gak stabil. Kadang ada, kadang enggak. Yaudah kakak gak jadi ngajuin proposal itu dek”

Pengalaman NM menjelaskan keterbatasan pengetahuan mengenai sumber daya yang ada. Serta adanya jaminan atau syarat-syarat tertentu terkadang membuat perempuan ragu akan kemudahan yang di tawarkan. Dampak dari terbatasnya akses modal bagi perempuan yaitu ketergantungan ekonomi pada laki-laki, kemiskinan yang terjadi terus menerus antargenerasi, banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal namun dengan pendapatan yang rendah dan dengan segala hambatan-hambatan yang mereka dapatkan di setiap pekerjaan yang mereka ambil. Kesimpulannya, keterbatasan akses terhadap modal bagi perempuan tidak hanya mencerminkan masalah ekonomi, tetapi juga ketidakadilan yang berakar dari budaya patriarki.

c. Peran Ganda dan Diskriminasi Upah di Sektor Informal

Sektor informal menjadi salah satu wadah bagi pekerja yang tidak terserap kedalam sektor formal dan faktanya mampu menjadi alternatif untuk mengatasi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Namun, di sisi lain dapat kita lihat bahwa sektor informal juga memiliki sisi gelap (Supraja & Asdi Artosa, 2023). Partisipasi perempuan di ruang publik terkadang dipandang sebagai saingan atau ancaman terhadap otoritas laki-laki, sehingga banyak dari perempuan yang bekerja di sektor informal dan mendapatkan upah yang rendah. Fakta bahwa perempuan dan laki-laki diupah secara tidak setara sudah menjadi fenomena global. Di antara negara-negara berpenghasilan tinggi, Belanda memiliki perbedaan upah gender terbesar, perempuan mendapatkan 40 persen penghasilan lebih rendah. Sedangkan di Republik Korea memiliki angka kesenjangan upah yaitu 37 persen. Sama hal nya dengan Indonesia yang memiliki kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Ditaksir bahwa perempuan memperoleh gaji 23 persen lebih rendah daripada laki-laki (Akbar, 2022).

Pekerjaan di sektor informal bisa saja berupa pedagang kecil, pekerjaan rumah tangga, usaha mikro, dan lainnya. Bekerja di sektor informal menjadi alternatif bagi perempuan untuk memperbaiki ekonomi (Supraja & Asdi Artosa, 2023), salah satunya disebabkan karena fleksibilitas waktu yang memungkinkan

bagi mereka untuk membagi waktu antara pekerjaannya dengan pekerjaan domestik. Meskipun fleksibilitas waktu pada sektor informal tampak menguntungkan pada perempuan, tetapi hal tersebut juga menjadi boomerang yang justru akan menciptakan ketidakpastian ekonomi, tanpa perlindungan sosial, dan meningkatnya kerentanan kemiskinan. Mereka harus membagi waktunya untuk tetap bekerja dan menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga yang mengakibatkan keterbatasan jam kerja sehingga mendapatkan upah kerja yang rendah dan tidak stabil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, informan merupakan pekerja di sektor informal dan juga melakukan peran ganda sebagai ibu rumah tangga. Salah satunya pengakuan dari ibu ER (44):

“Biasanya pagi kakak masak, terus antar anak jalan kaki ke sekolah sekalian kakak juga berangkat kerja nyapu di TK. Kakak juga ada kerja di posyandu sebulan sekali sesuai jadwal.”

Informan kedua juga mengaku bahwa ia bekerja di sektor informal yaitu bekerja sebagai karyawan laundry, pengakuan ibu FF (30):

“Kalau pagi aku kerjain kegiatan ibu rumah tangga kayak masak, pekerjaan rumah baru aku kerjain urusan laundry”

Rata-rata pendapatan yang perempuan dapatkan saat bekerja di sektor informal di Banda Aceh setiap bulannya di angka yang berbeda. Seperti penjelasan sebelumnya bahwa faktor ketidakstabilan pendapatan pada perempuan diakibatkan karena mereka juga menjalankan peran ganda. Upah di sektor informal seringkali di bawah angka upah minimum regional (UMR) dan mereka tidak ada jaminan kontrak. Sehingga bekerja di sektor informal hanya menjadi salah satu alternatif untuk menunjang masalah perekonomian. Jaminan yang didapatkan dalam berbagai bidang seperti kesehatan, asuransi, dan lainnya jarang sekali didapatkan oleh para pekerja di bidang informal (Subroto, 2019). Sehingga apabila adanya kecelakaan kerja dan tidak ada biaya pengobatan, maka akan menjadi rintangan baru yang dihadapi oleh para pekerja di sektor informal. Terkhusus perempuan yang menjalankan peran ganda akan mendapat hambatan yang lebih dalam mengatasi kemiskinan.

3. Budaya Patriarki

Tradisi patriarki masih dominan baik di negara berkembang ataupun di negara maju hingga saat ini, terutama di wilayah perdesaan. Patriarki merupakan suatu sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan di berbagai aspek kehidupan, sedangkan perempuan diposisikan sebagai subordinat atau kelas bawah (Juwita Handayani dkk., 2025). Ketidaksetaraan ini juga menjadi perhatian dunia sehingga menjadi salah satu isu yang disorot oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu tercantum pada tujuan kelima dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu “*Gender Equality and Women’s Empowerment*”. UNDP (United Nations Development Programme) juga memperkenalkan *Gender Inequality Index* sebagai perhitungan indeks ketimpangan gender di berbagai negara (Apriliandra dkk., 2022).

Penganut budaya patriarki beranggapan bahwa tugas perempuan hanya sebatas tugas reproduktif (melahirkan), mengurus anak, dan pekerjaan domestik di dalam rumah tangga. Sehingga muncul istilah dalam masyarakat bahwa tugas perempuan hanya di “dapur, sumur dan kasur” (Nasrulloh & Hidayat, 2022). Masyarakat penganut patriarki beranggapan peran dan batasan secara tradisional bahwa perempuan hanya di dapur untuk memasak kebutuhan makanan keluarga, di sumur untuk kebersihan dan cuci-menyuci, dan di kasur untuk melayani kebutuhan seksual laki-laki (suami). Dalam kehidupan berkeluarga, sosok yang disebut “bapak” (ayah) memiliki otoritas tertinggi di dalam keluarganya, apalagi terhadap perempuan (istrinya), anak-anak, maupun harta benda. Bukan hanya itu, peran bapak didalam keluarga juga sebagai pengambil keputusan yang utama dan memiliki hak yang paling istimewa. Contoh kecilnya seperti nasi yang harus dihidangkan, tidak mau berganti tugas dengan istri dalam hal menjaga anak, pulang kerja harus dijamu, dan lainnya. Budaya patriarki akan terus turun temurun terjadi apabila suatu keluarga menganut hal tersebut. Ketika di dalam keluarga seorang ayah menganut sistem patriarki, hal tersebut akan terus berlanjut kepada anak laki-laknya yang tentu akan berkeluarga. Kecuali ada yang memutuskan rantai tersebut di dalam suatu keluarga. Salah satu informan, ibu WN (48) bercerita pernah mengalami budaya patriarki dalam keluarganya dahulu:

“Dulu kami apa-apa laporan sama ayah. Mau kesana kesini selalu laporannya sama Ayah. Kadang pikiran ayah gak sejalan sama pikiran kami, itu ayah cuma dengar aja. Habistu semuanya tetap sama kemauan Ayah aja. Pendapat kami jarang di dengar dek. Mungkin karna dulu Ayah anggap kami masih anak kecil ya.”

Ibu WN (48) menceritakan kisahnya mengenai keterbatasannya dalam mengemukakan pendapat karena dianggap tidak memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Pengalaman tersebut menjadikan Ibu WN (48) sedikit trauma untuk menjelaskan kemauannya. Perlakuan subordinasi yang menganggap satu jenis kelamin lebih unggul dari jenis kelamin lainnya, seperti yang dikatakan diatas tentu menjadi suatu hambatan bagi salah satu jenis kelamin yang memiliki nilai yang lebih tinggi dalam suatu budaya masyarakat. Perempuan akan terus menerus bertanggung jawab atas keperluan domestik dan reproduksi, serta laki-laki dalam urusan publik dan produksi. Mereka dianggap memiliki penghargaan yang sama ketika menjalankan perannya masing-masing. Padahal laki-laki maupun perempuan dapat berkecimpung dalam sektor publik maupun domestik tanpa memandang jenis kelamin keduanya. Hal inilah yang menjadi akibat dari sistem dan struktur sosial yang menempatkan kaum laki-laki ataupun perempuan berada pada posisi yang merugikan padahal mereka bisa mengaskes keduanya (Karwati, 2021). Ibu CA (44) mengalami pengalaman yang berbeda dengan Ibu WN (48), informan CA (44) yang merupakan kepala rumah tangga dan bekerja sebagai ART mengalami pengalaman yang berbeda dalam keberadaan tradisi patriarki. Ibu CA (44) berkata:

“Dulu kakak gak kerja, dek. Semua urusan rumah tangga mantan suami yang tanggung. Padahal kakak pingin kerja, tapi gak di kasih sama abang. Sekarang udah cere, kakak gabisa apa-apa. Paling bisa cuma kerjaan rumah aja. Makanya kadang kalau ada orang suruh bantu-bantu di rumahnya baru bisa kakak kerja.”

AR - RANIRY

Pengalaman dari Ibu CA menjelaskan peran domestik yang ditanggungnya membuat ia tidak bisa berkembang dan harus bergantung kepada laki-laki. Karena sistem dalam rumah tangganya dahulu, laki-laki memiliki otoritas tertinggi dalam keluarga. Ibu CA juga mengaku pengklasifikasian peran publik dan domestik di dalam rumah tangganya sangat berlaku. Kedua informan merasa sudah terbiasa dengan tradisi tersebut karena sudah berlangsung sangat lama. Namun mereka tetap merasa tradisi yang terus berjalan itu sangat menghambat keberlangsungan hidup informan.

Adanya pengkotak-kotakan sektor yang disebut domestik dan publik membuat ruang gerak perempuan menjadi terbatas ketika ingin berkecimpung di

dalam ruang publik seperti laki-laki. Bukan hanya itu, keterbatasan perempuan untuk mengakses ruang publik juga mendapatkan tantangan tersendiri sehingga seringkali menimbulkan diskriminasi yang didapatkan oleh perempuan. Ketidaksetaraan yang perempuan dapatkan karena adanya persepsi akan peran gender yang mutlak. Keterlibatan perempuan dalam sektor publik selain mendapat stigma negatif dari masyarakat, tetapi terkadang menimbulkan masalah baru seperti adanya peran ganda yang mereka tanggung. Ketika perempuan terlalu sibuk berkecimpung dalam sektor publik tentu saja akan diikuti oleh stigma negatif sehingga munculnya persepsi “tidak bisa mengurus suami dan anak dengan baik”. Padahal keterlibatannya juga menjadi salah satu solusi dalam memberantas kemiskinan. Isu mengenai ketidaksetaraan gender ini menimbulkan munculnya gerakan feminis yang memperjuangkan hak-hak perempuan, menentang diskriminasi, serta melawan sistem patriarki yang menempatkan perempuan di posisi subordinat.

Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender dapat kita lihat dari tidak adanya diskriminasi antar jenis kelamin. Sehingga pihak-pihak yang merasa di diskriminasi akan mendapatkan haknya. Contohnya seperti hak mereka dalam memiliki akses, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, hilangnya persepsi negatif perempuan yang bekerja di sektor publik, hak pendidikan, sosial, dan lainnya. Memiliki akses dan partisipasi berarti perempuan memiliki peluang untuk menggunakan sumber daya yang ada dan memiliki hak untuk mengambil keputusan atas sumber daya tersebut (Karwati, 2021). Namun tentu saja bukan hal yang mudah untuk menangani masalah ketidaksetaraan gender dalam budaya patriarki yang akan terus menerus terjadi karena sudah menjadi budaya turun menurun di dalam masyarakat.

4. Domestifikasi pada Perempuan

Domestifikasi pada perempuan merujuk pada suatu proses atau konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam peran domestik, yaitu mengelola kebutuhan rumah tangga dan keluarga, sehingga akibatnya membatasi perempuan berpartisipasi di ruang publik. Fenomena domestifikasi sering dihubungkan dengan norma-norma tradisional dan penafsiran agama yang menonjolkan peran perempuan sebagai pengelola rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah.

Peran perempuan mengalami penurunan karena adanya kebijakan keras yang diterapkan pemerintahan Belanda terhadap perempuan pada akhir abad ke-19. Perempuan umumnya kehilangan akses terhadap posisi penting di bidang seperti pertanian dan perdagangan yang akhirnya beralih kepada pria. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa perempuan tidak memiliki peran di ruang publik, karena urusan perempuan hanya pada hal-hal pribadi saja. Namun pada awal abad ke-20, perempuan Indonesia kembali muncul ke permukaan dan mulai bangkit dari keterpurukan. Para perempuan Indonesia mencari solusi untuk bangkit dari budaya patriarki yang telah diciptakan. Satu persatu organisasi dan munculnya tokoh perempuan yang berpengaruh untuk memperjuangkan hak-hak perempuan (Fathoni, 2020).

Keberadaan domestifikasi membatasi akses perempuan di berbagai bidang seperti pendidikan, pekerjaan, maupun sumber daya ekonomi. Secara tidak langsung domestifikasi memperkuat adanya kemiskinan yang terjadi kepada perempuan dan keluarganya. Dalam beberapa penelitian menjelaskan pemberdayaan perempuan berbasis komunitas seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, pemberdayaan melalui organisasi komunitas, pengembangan usaha rumahan dan industri, dan kegiatan komunitas lainnya mampu memutuskan siklus domestifikasi yang memperparah kemiskinan. Dengan adanya pemberdayaan perempuan tersebut bukan hanya memperbaiki keadaan ekonomi perempuan serta keluarganya, namun juga mengubah paradigma sosial dan budaya yang menganggap perempuan hanya layak pada bidang domestik melalui pendidikan dan pemberdayaan secara komunitas. Berdasarkan pengalaman informan, yaitu Ibu NM (52) yang bekerja menjual kue basah mengaku pernah mengikuti pelatihan keterampilan membuat kue yang diadakan di kantor keuchik. Ibu NM (52) merasa kegiatan tersebut sangat positif untuk dirinya maupun ibu-ibu lain yang mengikuti acara tersebut.

Domestifikasi tidak semata-mata hilang dalam kehidupan. Namun bentuk dan intensitas domestifikasi telah mengalami perubahan seiring dengan kemajuan sosial maupun ekonomi. Di era sekarang banyak perempuan yang telah berkecimpung di ranah publik dan ekonomi, namun ketimpangan gender dan tekanan sosial yang memprioritaskan tugas domestik masih terus menerus terjadi. Contohnya seperti penjelasan sebelumnya yaitu hambatan perempuan saat menjalankan usaha namun sosial dan budaya membatasi peran mereka, kurangnya akses perempuan terhadap teknologi, literasi digital, dan lainnya.

Jadi, domestifikasi sebenarnya belum hilang seutuhnya, tetapi bentuknya lebih kompleks dan berlapis di era modern.

D. KESIMPULAN

Kemiskinan yang terjadi terkhusus pada perempuan di Kota Banda Aceh disebabkan oleh berbagai faktor. Bukan hanya dilatarbelakangi oleh keterbatasan mereka terhadap akses seperti pendidikan, kesempatan kerja, akses dalam kepemilikan modal, dan lainnya. Kemiskinan juga dapat terjadi karena adanya faktor budaya dan sosial di dalam masyarakat. budaya patriarki yang meletakkan perempuan pada posisi subordinat dan membatasi perannya dalam ruang publik. Domestifikasi juga menjadi faktor kemiskinan yang menekankan tugas perempuan hanya sebatas pada pekerjaan domestik saja. Akibatnya, perempuan akan terus menerus terperangkap dalam lingkaran kemiskinan apabila faktor-faktor yang dijelaskan diatas terus-menerus terjadi. Penelitian ini menggabungkan faktor budaya dan sosial, sehingga memberikan pengalaman yang lebih holistik dan kontekstual mengenai kemiskinan perempuan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang lebih fokus pada aspek pendidikan dan ekonomi saja, atau hanya fokus kepada faktor budaya saja. Penggabungan beberapa faktor tersebut dapat menjadi basis penting bagi penyusunan kebijakan dan program pemberdayaan perempuan kedepannya yang dapat mempertimbangkan perubahan budaya dan sosial secara stimulan. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan harus berfokus pada pendidikan literasi finansial dan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara berbagai pihak diperlukan agar program pengentasan kemiskinan lebih efektif dan menyentuh akar masalah sosial budaya yang membatasi perempuan. Bukan hanya kepada perempuan, seluruh masyarakat berperan aktif dalam pengentasan kemiskinan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Fattah Nasution. (2023). *Metode Peneliti Kualitatif*. CV. Harva Creative. <https://id.scribd.com/document/683201288/Buku-Metode-Penelitian-Kualitatif-abdul-Fattah>
- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Akbar, F. (2022). Gender Wage Gap: Evidence from Employment in Informal Sector. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 3(2), 104–117. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v3i2.301>
- Apriliandra, S., Suwandi, A. A., & Darwis, R. S. (2022). Peran Pekerja Sosial dalam Pemberdayaan Komunitas Perempuan Rawan Sosial dan Ekonomi. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.37538>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2025, Mei 26). *Statistik Pendidikan Provinsi Aceh 2024*. BPS Provinsi Aceh. <https://web-api.bps.go.id/download.php>
- BPS Provinsi Aceh. (2024). *Profil Kemiskinan Provinsi Aceh 2024*. BPS Provinsi Aceh. <https://aceh.bps.go.id/id/publication/2024/12/30/5e217c715c41fbd19903c44c/profil-kemiskinan-provinsi-aceh-tahun-2024.html>
- Fathoni, R. S. (2020). Domestifikasi Perempuan dalam Gerakan Islam Transnasional di Indonesia 1998–2016 M. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.22146/jwk.764>
- Fawziah, Z. B. (2020). Pembebasan Jerat Feminisasi Kemiskinan. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 2(1), 9–16. <https://doi.org/10.35905/almaarief.v2i1.1327>
- Ika Lenaini. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>
- Karwati, L. (2021). Menolak Subordinasi Gender Berdasarkan Pentingnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan Nasional Menjelang Bonus Demografi 2035. *Jendela PLS*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.37058/jpls.v5i2.2713>

- Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah & Almas Baisuri. (2022). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Perempuan Muslim Terhadap Tingkat Kemiskinan Jawa Timur. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5, 180–194.
- Muhammad Sauqi, Cut Risya Varlitya, & Muhammad Ilhamsyah Siregar. (2022). Pandemi Covid-19 dan Perempuan sebagai Kepala Rumah Tangga dalam Kemiskinan Urban di Banda Aceh. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 101–122. <https://doi.org/10.24815/jped.v8i2.23283>
- Musdawati. (2024). Perempuan Kepala Keluarga, Kemiskinan dan Pemberdayaan di Aceh. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 13(1), 45–54.
- Nasrulloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>
- Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467>
- Nofriadi, N., Elfiswandi, E., Rafki, R., & Lusiana, L. (2024). Analisis Hambatan dan Peluang Akses Pembiayaan bagi UMKM Perempuan: Studi Kasus Kota Padang. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Perencanaan Kebijakan*, 1(3), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jampk.v1i3.203>
- Open Data Aceh. (Oktober 2024). *Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin*. Open Data Aceh. <https://data.acehprov.go.id/es/dataset/jumlah-kepala-keluarga-menurut-jenis-kelamin-siak/resource/a4287a09-059c-45bf-ad13-8491df96c04a>
- Patimah Zahra & Hardius Usman. (2024). Peran Perempuan dalam Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017-2021. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 7(1), 33–49. <https://doi.org/10.14710/jdep.7.1.33-49>
- Reza Attabiurrobby Annur. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Jekulo Dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013. *Economics Development Analysis Journal*, 409–426. <https://doi.org/10.15294/edaj.v2i4.3209>
- Rizal, A., & Yantieka, N. (2022). Analisis Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Kemiskinan Pulau Sumatera Dengan Variabel Pendidikan Tahun 2016 –

2021. *ETNIK: Jurnal Ekonomi dan Teknik*, 1(7), 518–529.
<https://doi.org/10.54543/etnik.v1i7.91>
- Rulam Ahmadi. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. AR-RUZZ MEDIA.
- Subroto, W. (2019). Peran dan Implementasi Hukum dalam Memberikan Kepastian Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 2(2), 147–158. <https://doi.org/10.54783/japp.v2i2.456>
- Supraja, M., & Asdi Artosa, O. (2023). Kemiskinan Pekerja Perempuan dan Sektor Informal di Sarkem. *Jurnal Masyarakat dan Desa*, 3(1), 19–40. <https://doi.org/10.47431/jmd.v3i1.311>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003*. (2004). Pusat Data dan Informasi Pendidikan, Balitbang - Depdiknas.

